

PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN DI PEDESAAN : ANALISIS PENGALAMAN PROGRAM SLT DAN IDT

*(Empowering Poor Farmer in Villages:
Analysis of Experience Of SLT and IDT Programme)*

Christine Sri Widiputranti

ABSTRACT

There are two events that almost similar, first, economy crisis in 2005 because increasing oil price almost 100 percent, second, economy crisis in 1997 because monetary situation. In 2005, government carried out SLT programme for solving poverty, and in 1997 government carried out IDT programme. SLT programme was not followed by empowering poor farmer, but IDT programme was followed by empowering poor farmer. IDT programme gave capital for business for instance livestock, and gave livestock extension and guidance. The result of empowering poor farmer were, there were increasing income level and saving ability of poor farmer.

Key words: empowering, poor farmer, economy crisis.

Ada dua peristiwa yang hampir mirip, yakni krisis ekonomi karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 dan krisis moneter pada tahun 1997. Pada tanggal 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yang tingginya hampir 100 % (harga premium Rp. 2.400,00 naik menjadi Rp. 4.500,00 per liter, harga minyak tanah Rp. 885,00 naik menjadi Rp. 2.000,00 per liter, dan harga solar Rp. 2.200,00 naik menjadi Rp. 4.300,00 per liter (Tim KR, 2005), hal ini mengakibatkan ekonomi rakyat semakin lemah. Rakyat kecil terutama petani semakin miskin, sebab harga hasil pertanian tidak berubah sementara harga sarana produksi pertanian dan kebutuhan hidup semakin melangit. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter, harga-harga meningkat tajam, sehingga kehidupan petani di pedesaan semakin sulit, jumlah petani miskin semakin bertambah.

Pada tahun 2005, ada upaya untuk mengatasi kemiskinan akibat krisis kenaikan

harga BBM, yakni pemerintah mengeluarkan program subsidi BBM bagi rakyat miskin yang kemudian dikenal dengan Subsidi Langsung Tunai (SLT). Berdasarkan data tentang petani miskin dari Biro Pusat Statistik (BPS), maka keluarga (petani) miskin di pedesaan memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 300.000,00 per tri wulan, sehingga untuk satu tahun setiap keluarga tani miskin memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 1.200.000,00. Dana ini diberikan langsung kepada keluarga-keluarga miskin, dengan tujuan untuk membantu ekonomi keluarga miskin akibat harga-harga yang meningkat, tidak ada keharusan dana tersebut sebagai modal usaha, namun bila memungkinkan diseyogyakan untuk modal usaha.

Pada tahun 1997, juga ada upaya untuk mengatasi kemiskinan petani di pedesaan akibat krisis moneter, yakni pemerintah mengeluarkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT digerakkan melalui kelompok-kelompok masyarakat (pokmas), setiap pokmas

beranggotakan sekitar 30-70 petani dan memperoleh dana pinjaman sekitar Rp. 1.300.000,00, setiap petani memperoleh dana pinjaman berbeda-beda, rata-rata per petani memperoleh dana pinjaman sekitar Rp. 57.000,00 atau setara 24,8 kg beras, dengan catatan harga beras Rp. 2.300,00 per kg. Dana tersebut digulirkan sampai tiga tahap, yang setiap tahapan besarnya relatif sama, dana tersebut sebagai pinjaman yang pengembaliannya diangsur 10 – 20 kali, dengan besar bunga 0,5 % per bulan dalam jangka waktu 10 – 20 bulan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dilaksanakan tahun 2005, dan membandingkan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan tahun 1997an, serta menganalisis dampak program-program tersebut di pedesaan Kabupaten Gunungkidul.

PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN POLA SLT DAN IDT

Kemiskinan merupakan problema di negara yang sedang berkembang, ada beberapa kriteria tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia, ukuran kemiskinan adalah pendapatan \$ 50 per kapita per tahun untuk daerah pedesaan, dan \$ 75 per kapita per tahun untuk daerah perkotaan. Menurut Sajogyo (1982), garis kemiskinan diukur dari pendapatan per kapita per tahun. Untuk pedesaan, garis “nyaris cukup pangan” adalah pendapatan per kapita per tahun kurang dari 240 kg setara nilai tukar beras, garis “miskin sekali” adalah pendapatan per kapita per tahun 360 kg setara nilai tukar beras, dan garis

“miskin” adalah pendapatan per kapita per tahun 480 kg setara nilai tukar beras.

Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini menjadi perdebatan. Dengan kata lain, tidaklah mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Jadi dalam hal ini, kemiskinan tidak saja menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hal ini disebabkan, didalam masyarakat kadangkala ada orang yang secara kuantitatif atau obyektif (bila dihitung pendapatannya dengan rupiah) tergolong miskin, akan tetapi karena orang tinggal dalam lingkungan budaya tertentu, orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan orang merasa cukup dan justru berterima kasih pada nasibnya, hal ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai budaya tertentu seperti nilai-nilai “nrimo”, takdir, nasib, dan sebagainya.

Ada berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan penduduk, diantaranya melalui pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses mengupayakan agar manusia menjadi berdaya, berkemampuan, mempunyai akal untuk mengatasi problema yang dihadapi. Ada berbagai cara pemberdayaan, diantaranya melalui pembinaan, penyuluhan, sehingga individu yang

diberi penyuluhan ataupun dibina menjadi meningkat pengetahuan dan keterampilannya, serta berubah sikapnya sehingga mampu mengatasi problema yang dihadapi. Menurut Rogers (1995), pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan merupakan suatu proses, yakni dari *awareness* (kesadaran), *interest* (tertarik), *evaluation* (penilaian), *trial* (coba-coba), sampai *adoption* (penerapan inovasi).

Bandura (1997) menjelaskan teori "*social learning*", bahwa individu akan belajar sosial melalui "model" atau "contoh", proses *social learning* diawali dengan "*atensi*" (memperhatikan model), "*retensi*" (mengingat-ingat model), "reproduksi motorik" (menerapkan dengan cara meniru model), dan "*motivation*" (termotivasi untuk menerapkan terus atau berhenti). Dengan demikian, ketika dilakukan penyuluhan ataupun pembinaan, dan ada model/contoh yang menarik, maka akan terjadi proses *social learning*. Program SLT untuk mengatasi kemiskinan tidak disertai dengan "model", sementara itu program IDT disertai "model" yakni model yang berupa usaha ternak kambing. Model usaha ternak kambing dikembangkan pada petani miskin peserta program IDT, karena komoditi ini relatif mudah pemeliharaannya dan mudah dalam pemasaran, nilai jualnya cukup lumayan tinggi.

Di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurut Bupati Gunungkidul (Awa, 2006), jumlah keluarga miskin pada tahun 2006 ini sebanyak 96.104 KK, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun

sebelumnya (tahun 2005) yakni hanya 74.293 KK, dan angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan data BPS tahun 1993 yang mencatat KK miskin hanya 25.108 KK (Widiputranti, 1999). Dengan demikian, selama sekitar 13 tahun di Gunungkidul terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir 4 kali lipat.

Program SLT tidak melaksanakan pemberdayaan kepada petani peserta SLT. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2005, yang diarahkan untuk membantu keluarga-keluarga miskin akibat dinaikkannya harga BBM. Karena sebagian besar penduduk Gunungkidul adalah petani yang sebagian besar dalam kondisi miskin, maka sebagian besar penerima dana dari program SLT adalah petani. Setiap keluarga petani miskin memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,00 per triwulan, sehingga setahun memperoleh bantuan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (setara 300 kg beras, dengan catatan harga beras Rp. 4.000,00 per kg). Dana bantuan ini sifatnya subsidi, tidak ada keharusan untuk dijadikan modal usaha, dan tidak ada keharusan bagi penerima dana SLT untuk mengembalikan. Dengan demikian, pada umumnya dana yang diperoleh dari SLT ini untuk konsumsi keluarga petani, terlebih lagi mahalnya input atau sarana produksi pertanian, bahkan terjadi kelangkaan pupuk dimana-mana, walaupun ada pupuk harganya mahal. Dengan demikian, program SLT ini sulit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, apabila 20 petani miskin penerima SLT dikumpulkan menjadi satu kelompok usaha, maka akan dapat terkumpul uang Rp. 1.200.000,00 x 20 orang = Rp. 24.000.000,00 setahun, suatu jumlah

yang cukup memadai untuk modal usaha di pedesaan.

Pada pola IDT pemberdayaan petani peserta IDT dilaksanakan oleh petugas yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan pamong desa, bantuan berupa pinjaman yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang anggotanya sekitar 30 - 70 orang petani. Setiap petani memperoleh dana pinjaman tidak sama, rata-rata per petani memperoleh pinjaman sebesar Rp. 57.000,00, pinjaman diberikan tiga kali, sehingga total pinjaman sekitar Rp. 171.000,00 (sekitar 74,3 kg beras). Pinjaman tersebut harus dikembalikan antara 10 – 20 bulan dengan bunga 0,05% per bulan. Dana pinjaman IDT tersebut kebanyakan untuk usaha ternak kambing. Dalam program IDT, peserta IDT memperoleh binaan dari petugas yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan pamong desa, ada pertemuan rutin kelompok yang membahas usaha tani/ peternakan dan pengembangan usaha/bisnis.

DAMPAK PROGRAM SLT DAN IDT PADA PETANI MISKIN

SLT yang diterima petani miskin pada umumnya digunakan untuk konsumsi, karena petani memang tidak diberdayakan untuk pengembangan usaha. Berkembangnya usaha pertanian sebagai akibat program SLT tidak tampak, demikian pula keberdayaan petani miskin tidak tampak, bahkan kebanyakan petani mengeluh akibat mahalannya harga-harga sarana produksi terutama pupuk, bahkan di berbagai daerah terjadi kelangkaan pupuk (Anonim, 2006). Oleh karena program SLT bersifat bantuan

(bukan pinjaman), dianggap anugerah dari “langit”, menyebabkan orang berbondong-bondong ingin memperoleh bantuan dengan cara memiskinkan diri, sehingga salah sasaran, ada pamong desa atau keluarganya yang memperoleh dana bantuan, ada yang namanya dobel, ada yang benar-benar miskin justru tidak memperoleh dana bantuan, dan sebagainya (Awa/Ewi, 2006). Disamping itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gungkidul juga menerima laporan adanya sistem “ijon” SLT, yakni penerima dana SLT sebelum menerima kartu (digunakan untuk mengambil bantuan) diminta membayar dahulu Rp. 50.000,00, sehingga bila dihitung penerima SLT hanya menerima bantuan uang Rp. 250.000,00 (Ewi, 2006).

Pada program IDT, petani penerima IDT yang tergabung dalam kelompok masyarakat memperoleh binaan dan penyuluhan dari petugas pokmas ataupun penyuluh pertanian dan pamong desa. Secara rutin kelompok masyarakat (pokmas) IDT mengadakan pertemuan, mendapat binaan dan penyuluhan, membahas permasalahan usaha ternak, membahas pengembangan usaha, bekerjasama dalam kelompok. Dengan demikian, terjadi proses interaksi antar anggota, terjadi proses *social learning* (belajar sosial) (Bandura, 1997), sehingga terjadi proses saling meniru, saling mengisi kekurangan, saling belajar, yang menyebabkan proses kemajuan bersama di dalam kelompok.

Hasil analisis program IDT menunjukkan, bahwa selama satu tahun (tahun 1998) peserta program IDT meningkat pendapatannya dari peternakan kambing IDT sekitar Rp. 74.997, 00

s/d Rp. 120.472,00, secara persentase pendapatannya meningkat sekitar 3,15 % s/d 6,10 % dari total pendapatan (Widiputranti, 1999). Selama satu tahun, program IDT mampu meningkatkan pendapatan petani setara dengan beras 32,6 kg s/d 37,6 kg beras, atau per bulan petani miskin mampu meningkatkan pendapatan sekitar 2,7 kg s/d 3,1 kg beras, apabila dinilai tahun 2006 ini maka petani miskin mampu meningkatkan pendapatan per bulan sekitar Rp. 10.800,00 s/d Rp. 12.400,00. Di samping peningkatan pendapatan, peserta IDT juga meningkat kemampuannya menabung, karena didalam kelompok dikembangkan pola

menabung.

Apa yang menyebabkan keberhasilan pemberdayaan petani, hal ini perlu dianalisis untuk mengembangkan pola pemberdayaan petani yang efektif dan efisien. Widiputranti (1999) melakukan analisis pada dua kelompok pokmas di Gunungkidul, satu kelompok pokmas anggotanya pria semua dan yang lain anggotanya wanita semua. Dengan menggunakan analisis regresi, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan petani melalui program IDT, hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Petani melalui Program IDT.

Faktor-faktor	Kelompok IDT WANITA (N= 40)		Kelompok IDT Pria (N = 40)	
	Koef Reg	Nilai t	Koef Reg	Nilai t
1.Pendidikan	0,4987	3,484 *)	-0,0050	-0,038
2.Umur	0,0335	0,842	-0,1006	-2,165 *)
3.Pertemuan klp	-0,1296	-1,327	-0,0388	-0,447
4.Sikap	0,1559	0,866	0,0173	0,090
5.Motivasi	0,6764	2,080 *)	0,5621	2,920 *)
6.Jumlah Balita	0,5147	0,667	-0,4678	-0,669
7.Kerja domestik	0,0184	0,123	0,5678	1,712

Konstanta -1,5605 9,8958

R Square 0,3870 0,3608

Nilai F 2,8860 *) 2,5800 *)

Keterangan *) = signifikan pada alpha 5 %

Sumber: Analisis Data Primer.

Dari tabel 1, pada pokmas wanita, tampak bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program IDT adalah pendidikan (koefisien regresi 3,484) dan motivasi kerja (koefisien regresi 2,080) dengan tingkat kesalahan 5%. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan wanita peserta IDT maka akan berpengaruh meningkatkan keberhasilan program IDT. Selain itu, semakin kuat motivasi kerja

wanita maka akan berpengaruh meningkatkan keberhasilan program IDT.

Sementara itu, pada pokmas pria, tampak bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program IDT adalah umur (koefisien regresi -2,165) dan motivasi kerja (koefisien regresi 2,920) dengan tingkat kesalahan 5%. Artinya, semakin muda umur petani maka akan berpengaruh meningkatkan

tingkat keberhasilan program IDT. Selain itu, semakin kuat motivasi kerja maka akan berpengaruh meningkatkan keberhasilan program IDT. Apabila dicermati, variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program IDT, baik pada Pokmas IDT wanita maupun Pokmas IDT pria.

Dari analisis regresi berganda tersebut dapat dijelaskan, bahwa apabila pemberdayaan dilakukan pada pokmas wanita tani, maka penyuluh agar memilih yang berpendidikan relatif tinggi (SMP keatas) dan memiliki motivasi kerja yang kuat. Apabila pemberdayaan dilakukan pada pokmas pria, maka penyuluh agar memilih petani yang relatif muda (umur kurang dari 50 tahun) dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Apabila pemberdayaan dilakukan pada petani miskin pria dan wanita, maka yang utama adalah memberikan motivasi kerja, digerakkan dan dikembangkan agar petani memiliki dorongan atau motivasi kerja yang tinggi, bersemangat, ulet, tahan uji, dan tidak mudah patah semangat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisis pelaksanaan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) tahun 2005 maupun program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1997 dan faktor-faktor yang berpengaruh, maka dapat disimpulkan (1) pemberdayaan petani miskin pola IDT lebih berhasil dibandingkan dengan pemberdayaan pola SLT, (2) program pengentasan kemiskinan pola SLT kurang jelas, bahkan banyak terjadi salah sasaran, terjadi kecemburuan sosial, banyak masyarakat yang “memiskinkan diri” agar

diberi bantuan SLT, (3) dampak pemberdayaan petani pada pola IDT cukup nyata, yakni adanya peningkatan pendapatan petani sebesar 3,15 - 6,10 % setahun, (4) melalui pemberdayaan, petani miskin berkembang pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya, sehingga berusaha mengembangkan usahanya, memupuk modal melalui tabungan, (5) pemberdayaan petani miskin perlu disertai dengan peningkatan motivasi kerja, agar petani bersemangat, ulet, tekun, dan selalu berusaha. Hal ini dapat dilakukan melalui belajar pada petani lain yang berhasil dalam bisnisnya.

Saran-saran pelaksanaan program SLT maupun program IDT yaitu (1) upaya penanggulangan kemiskinan pada petani miskin seyogyanya disertai dengan pemberdayaan, agar petani berkembang wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Petani miskin juga perlu ditingkatkan motivasi kerjanya, sehingga selalu berusaha mengembangkan dirinya agar mampu menolong dirinya sendiri, (2) pengembangan usaha tani diarahkan ke agribisnis, sehingga petani mampu mengusahakan komoditas pertanian yang bernilai jual tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrina. 2006. *Lagi-lagi Pupuk Langka*. Agrina Vol.1. No.25. 5-18 April. 2006. Halaman: 4. Jakarta.
- Awa. 2006. *Bupati Gunungkidul Prihatin Jumlah Keluarga Miskin Meningkat*. Kedaulatan Rakyat 20 April 2006. Halaman: 6. Yogyakarta.

- Awa/Ewi. 2006. 170 *Rumah Tangga Miskin Tidak Layak Terima Kompensasi BBM. Kedaulatan Rakyat*. 20 April 2006. Halaman: 6. Yogyakarta.
- Bandura. A. 1997. *Social Learning Theory. Englewood Clift*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Ewi. 2006. *Sejumlah Penerima SLT terjerat Ijon. Kedaulatan Rakyat 2-5- 2006*. Halaman: 5. Yogyakarta.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations*. The Free Press. New York.
- Sajogyo. 1982. *Menelaah Garis Kemiskinan. Lokakarya Metodologi Kaji Tindak. Proyek Pembinaan Peningkatan Petani Kecil*. Cisarua. Bogor.
- Tim KR. 2005. *Alot, Sidang Kabinet Soal Kenaikan Harga BBM. Premium Rp 4.500,-/liter. Kedaulatan Rakyat*. 1 Oktober 2005. Halaman: 1. Yogyakarta.
- Widiputranti, Christine Sri. 1999. *Studi Banding Kelompok Masyarakat IDT Wanita dengan Kelompok Masyarakat IDT Pria di Kabupaten Gunungkidul*. Thesis S2. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
-